

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Achmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang(Legisprudence)*. Jakarta: Kencana
- Aminuddin Ilmar. 2014. *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta: Prenamedia Group
- Boedi Harsono. 2008. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta:Djambatan
- Bohari. 1992. *Pengawasan Keuangan Negara*. Jakarta: Rajawali Pers
- Elisabeth Nurhaini. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung:PT Rafika Aditama
- Flonarianus. SP Sangsun.2007. *Tata Cara Mengurus Sertifikat Tanah*. Jakarta:Visimedia
- Hanif Nurcholih. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2002. Jakarta: Balai Pustaka
- Moh Mahfud Md, SF Marbun. 2009. *Wewenang Dalam Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Airlangga
- Nurmayani. 2009. *Hukum Administrasi Daerah*. Bandar Lampung
- P. Parlindungan.1999. *Pendaftaran Tanah Di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju
- Ramli Zein. 1995. *Hak Pengelolaan Dalam Sistem UUPA*. Jakarta: Rineka Cipta Jaya
- Ridwan HR. 2017. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers
- Saefullah. 2015. *Penuntun Praktis Motode Penelitian Dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*. Bandung:CV Keni Media
- Samun Ismaya. 2013. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Graha Ilmu

- Sarwoto. 1990. *Dasar- Dasar Organisasi dan Managemen*. Jakarta:Ghala Indonesia
- Soerjono Soekanto. 2007. *Pokok- Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta:PT Grafindo Persada
- , 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers
- , 2005. *Faktor-Faktor Yang memengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo
- Sujanto. 1986. *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*. Jakarta:Ghalia Indonesia
- Suteki. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat teori dan Praktik)*. Jakarta:Rajawali Pers
- Victor M Situmorang, Jusuf Juhir. 1999. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*. Jakarta: RIneka Cipta
- Widjaya Amin Tunggal. 1993. *Manajemen Suatu Pengantar Cetakan Pertama*. Jakarta: Rineka Cipta Jaya

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pengaturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pembendaharaan Negara
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan Nasional
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 Tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah

Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Bada Pertanahan Nasional Nomor Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan

Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1963 Tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum yang dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan

Internet

Muh Zikran. "254 Aset lahan Pemkot Makassar Belum Bersertifikat"
<https://beritaini.com/254-aset-lahan-pemkot-makassar-belum-bersertifikat/> diakses pada 2 September 2020 pukul 20:19

Sri Lestari. 2020. "Penting, Dua Alasan Mengapa Tanah Perlu Disertifikatkan".
<https://properti.kompas.com/read/2020/08/10/155407421/penting-dua-alasan-mengapa-tanah-perlu-disertifikatkan> diakses pada tanggal 8 September 2020 Pada pukul 21:24

Syafruddin Kalo. 2008. "Aspek dan Implikasi Hukum dalam Pendaftaran Tanah dan Penertiban Sertifikat Hak-Hak atas Tanah"
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol19216/aspek-dan-implikasi-hukum-dalam-pendaftaran-tanah-dan-penertiban-sertifikat-hakhak-atas-tanah/> diakses pada tanggal 1- September-2020 pada jam 20:14

LAMPIRAN



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS PERTANAHAN
Jalan Jendral Ahmad Yani No. 2 Telp. (0411) 316006
MAKASSAR

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor: 800.2/187/DISTAN/III/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : A ZULKIFLY., S.STP, M.Si
NIP : 19800630 199810 1 002
Pangkat/Gol : Pembina / IV.a
Jabatan : Sekretaris Dinas Pertanahan Kota Makassar

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : **KURNIAWATI**
NIM / Jurusan : B12116518 / Hukum Adm. Negara
Pekerjaan : Mahasiswi (S1) / UNHAS Makassar
Alamat : Jl. P. Kemerdekaan Km. 10, Makassar

Benar telah melakukan Penelitian pada Dinas Pertanahan Kota Makassar dalam rangka Penyusunan Skripsi mulai tanggal 01 Desember s/d 30 Desember 2021 dengan Judul: **"TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN SERTIFIKASI TANAH YANG MENJADI ASET PEMERINTAHAN KOTA MAKASSAR"**.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 09 Maret 2021

KEPALA DINAS PERTANAHAN
SEKRETARIS

A. ZULKIFLY., S.STP, M.Si
Pangkat: Pembina
NIP. 19800630 199810 1 002

Tembusan:

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi. Sul - Sel di Makassar;
2. Dekan Fakultas Hukum UNHAS Makassar di Makassar;
3. Peringgal;



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Jalan Andi Pangerang Pettarani Nomor 8 Makassar Telp: (0411) 866622 email: kot-makassar@atrbpn.go.id

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 1177/SKet-73.71.UP.02.01/III/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : KURNIAWATI
Nomor Pokok : B121 16 518
Pekerjaan : MAHASISWA (S1)
Program Studi : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA PADA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR.

Telah mengadakan penelitian pada Instansi kami dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul penelitian "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Yang Menjadi Aset Pemerintah Kota Makassar".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 9 Maret 2021

An. Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar
Kepala Subbagian Tata Usaha,



Sri Gusriati, S.E., M.M.
NIP. 19640803 198603 2 014



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 2 Telp. (0411) 3633700-3615450, Fax. (0411) 3633700
MAKASSAR 90111

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor: 900.04 / 290 / BPKAD / III / 2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. MUHAMMAD RACHMAT AZIZ, M.Si.

Jabatan : Kepala Bidang Aset BPKAD

Menerangkan bahwa Mahasiswa/i Perguruan Tinggi yang bernama:

Nama : KURNIAWATI

NIM : B12116518

Jurusan/Fakultas : Hukum Administrasi Negara/Hukum

Perguruan Tinggi : Universitas Hasanuddin

Benar telah melakukan penelitian / pengumpulan data pada Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar, dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul : ***"Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Sertifikasi Tanah yang Menjadi Aset Pemerintah Kota Makassar"***.

Demikian surat keterangan ini kami berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 8 Maret 2021

Kepala Bidang Aset
BPKAD Kota Makassar,



Drs. Muhammad Rachmat Aziz, M.Si.

NIP. 19711022 199101 1 003